PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 03 TAHUN 2000

TENTANG

BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, bulat riil dan bertanggungjawab, maka dipandang perlu membentuk Badan Perwakilan Desa (Baperdes).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1956;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Pasal 32 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Utara.
- b. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan ditingkat Desa.
- c. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat

setempat yang diatur dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

- d. Badan Perwakilan Desa adalah Lembaga Legislatif di tingkat Desa yang selanjutnya disebut Baperdes.
- e. Peraturan Desa adalah Peraturan Yang dibuat oleh kepala desa bersama-sama Baperdes.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan badan perwakilan desa adalah untuk memperkuat Pemerintah Desa serta mewadahi perwujudan pelaksanaan Demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) Badan Perwakilan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintahan Desa.

Pasal 3

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota secara langsung dalam rapat Baperdes dan disahkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Kedudukan Badan Perwakilan Desa dalam susunan organisasi Pemerintah Daerah adalah mitra sejajar Kepala Desa dan wadah Permusyawaratan dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila.
- (2) Badan Perwakilan Desa berfungsi:
 - a. Mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang didesa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
 - b. Merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa.
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.
 - d. Menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Badan Perwakilan Desa mempunyai tugas untuk menyalurkan dan menindaklanjuti pendapat masyarakat desa dalam setiap rencana yang diajukan kepada desa sebelum dijadikan Keputusan Desa.

BAB IV KEANGGOTAAN DAN PENGURUS

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Badan Perwakilan Desa dipilih dari calon-calon yang diajukan dari tokoh adat, agama, organisasi sosial politik, organisasi wanita, organisasi pemuda, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan UUD 1945.

- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghinai Pancasila dan UUD 1945.
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya berijazah SD/Berpengalaman sederajat.
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun/sudah menikah.
 - f. Berbadan sehat.
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya.
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
 - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan.
 - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didesa setempat.
 - l. Bersedia dicalonkan.
 - m. Berdomisili 2 tahun berturut-turut didesa yang bersangkutan.
 - n. Memenuhi syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (2) Anggota Baperdes dipilih oleh masyarakat sesuai dengan jumlah penduduk yaitu:
- a. Sampai dengan 1.500 Jiwa..... 5 Anggota
 - b. 1.500 s/d 2.000 Jiwa..... 7 Anggota
 - c. 2.001 s/d 2.500 Jiwa..... 9 Anggota
 - d. 2.501 s/d 3.000 Jiwa.....11 Anggota
 - e. Lebih dari 3.000 Jiwa.....13 Anggota
- (3) Anggota Baperdes yang terpilih disampaikan kepada Bupati untuk disahkan.

Pasal 6

Pengurus Badan Perwakilan Desa terdiri dari:

- a. Ketua dan Wakil Ketua.
- b. Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Pengurus Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota Baperdes dengan syarat:
 - a. Pengurus Badan Perwakilan Desa tidak boleh merangkap jabatan/tugas di Pemerintah Desa.
 - b. Pengurus dan anggota Baperdes bertugas sejak tanggal diresmikan keanggotaannya.
- (2) Badan Perwakilan Desa memiliki Sekretariat Baperdes yang berlainan dengan Kantor Kepala Desa.

BAB V HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa berhak atas uang sidang/tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa yang ditetapkan setiap Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Badan Perwakilan Desa berwenang untuk mengawasi Kepala Desa dalam melaksanakan Keputusan Desa dan Kebijakan-kebijakan Pemerintah lainnya.
- (3) Badan Perwakilan Desa berwenang mengingatkan Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Badan Perwakilan Desa dapat menolak pertanggung jawaban Kepala Desa jika tidak sesuai dengan tugas yang diusulkan oleh Baperdes.